



EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus Website Desa Tambakbaya Kecamatan Kabupaten Lebak)

Ichsanudin, Nunu Nur Azizah
Ihsanudin1947@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi saat ini, tidak mengherankan jika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pemerintah. Apalagi di era otonomi daerah saat ini, perlu diwujudkan good governance dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut e-government. Melalui e-government, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Sebagaimana dikemukakan oleh Dwiyanto (2011:181) bahwa birokrasi pemerintah dapat mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, memfasilitasi interaksi dengan masyarakat, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebagai upaya untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelayanan publik berbasis online di desa tambak baya. Penggunaan metode kualitatif dikarenakan data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa deskripsi tentang kondisi faktual penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik di desa, yang kemudian ditafsirkan oleh peneliti berdasarkan sudut pandang yang di sampaikan oleh informan utama dan informan pendukung di desa tambakbaya. Penelitian ini menjabarkan tentang efektivitas website desa yang sudah di terapkan di desa tambakbaya yang ternyata hingga saat ini masih harus dilakukan perbaikan dan peningkatan dari segi sumber daya manusia itu sendiri dalam mengelola website desa tambakbaya.

Kata kunci: informasi, Efektivitas, Pemerintah desa.

Abstract

In the current era of globalization, it is not surprising that advances in information and communication technology can promise efficiency, speed of information delivery, affordability, and transparency, and the government is no exception. Especially in the current era of regional autonomy, it is necessary to realize good governance by utilizing information and communication technology or what is commonly called e-government. Through e-government, improvement of public services can be realized. As stated by Dwiyanto (2011: 181) that the government bureaucracy can develop the use of information and communication technology (ICT) in carrying out government activities, facilitating interaction with the community, and encouraging accountability and transparency of public service providers. This study uses qualitative methods, as an attempt to create a systematic, factual, and accurate description and picture of online-based public services in Tambakbaya village. The use of qualitative methods is because the data obtained in this study are in the form of descriptions of the factual conditions of implementing information technology in public services in the villages, which are then reported by researchers based on the points of view conveyed by the main informants and supporting informants in the village of Tambakbaya. This research describes the effectiveness of the village website that has been implemented in the Tambakbaya village, which turns out to be repaired and improved in terms of the human resources themselves in managing the Tambakbaya village website.

Keywords: information, effectiveness, village government.



PENDAHULUAN

Desa sebagai salah entitas pemerintahan juga memiliki peran yang sama dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yakni pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Dalam menjalankan fungsi tersebut tentunya desa dibekali dengan sejumlah peraturan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Selain itu, desa juga mendapatkan pendanaan yang bersumber baik dari pemerintah, maupun pemerintah daerah, serta sumber lainnya. Sejatinya dengan bekal tersebut, mestinya desa lebih berdaya dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Namun faktanya sering menampilkan kondisi yang bertolak belakang dengan gambaran yang diinginkan oleh masyarakat. Pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan desa masih terkendala banyak hal, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana, serta sumber pembiayaan. Kondisi objektif tersebut sebenarnya tidak dapat dibebankan sepenuhnya pada tanggung jawab pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa. Diperlukan keterlibatan para pihak baik institusi-institusi supra desa maupun lembaga lain termasuk perguruan tinggi untuk ikut andil dalam mendorong kemajuan di desa.

Berbagai masalah tersebut seharusnya dapat diminimalisir dengan menghadirkan inovasi-inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Inovasi walaupun dalam bentuk dan skala yang sederhana akan melahirkan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan penunjang inovasi itu sendiri. Inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi tidak harus yang rumit, akan tetapi

yang terpenting adalah nilai kegunaannya dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Desa seringkali tidak tersentuh atau terlambat dalam merespon perubahan-perubahan terutama dalam konteks penerapan berbagai teknologi yang mendukung aktifitas pemerintahan dan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan desa selalu dihadapkan dengan kondisi kemiskinan, ketertinggalan infrastruktur, sumber daya manusia yang terbatas, dan lainnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelusuran sumber secara online yang kami lakukan, dapat diketahui beberapa kendala yang umumnya dihadapi pemerintah Desa Tambakbaya kecamatan Cibatadak dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Diantara kendala tersebut adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi baik dalam bentuk website atau aplikasi yang lain. Desa tersebut saat ini sudah memiliki website, namun informasi yang disajikan tidak aktual (*up-to-date*), hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu untuk merawat (*maintenance*) website tersebut. Sejauh ini, masih menggunakan aplikasi terbuka (*open source*) yang tidak berbayar. Akan tetapi informasi yang disajikan dalam website tersebut masih sangat terbatas, belum di-update, dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, belum memiliki inovasi pelayanan secara *online* yang lainnya, pelayanan kepada masyarakat masih dilakukan secara konvensional (*manual*), dimana untuk memperoleh sebuah pelayanan masyarakat harus datang sendiri ke kantor desa. Hal tersebut tentunya akan menjadi kurang efektif dan efisien bagi masyarakat juga bagi perangkat desa yang melayani. Memang jarak dan waktu tempuh masyarakat dalam menjangkau kantor desa tidaklah terlalu jauh dan



lama, akan tetapi dalam konteks saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang mudah, murah dan sederhana semakin mengemuka, apalagi generasi masyarakat kini kebanyakan dari kaum melenial yang sangat terbuka (open minded) terhadap berbagai perubahan terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Terkait dengan beberapa permasalahan tersebut maka kami tertarik untuk melakukan kajian tentang pelayanan publik berbasis online di desa, dengan mengambil lokus di Tambakbaya kecamatan cibadak kabupaten lebak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebagai upaya untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelayanan publik berbasis online di desa. Penggunaan metode kualitatif dikarenakan data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa deskripsi tentang kondisi faktual penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik di desa, yang kemudian ditafsirkan oleh peneliti berdasarkan persepsi. Informan, data-data sekunder, dan dari hasil pengamatan secara langsung pada lokus penelitian sehingga dapat dilihat kesiapan pemerintah desa dalam menerapkannya. deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini berkaitan langsung dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa. Sumber data (subjek penelitian) diambil secara purposive sampling. Adapun subjek penelitiannya berjumlah 5 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Dusun, dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Penelitian dilaksanakan pada 4 Desember 2022 di desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak,

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2015: 83) Triangulasi merupakan proses menemukan kesimpulan dengan mengecek ulang dari berbagai sudut. Hasil Dan Pembahasan. Di berlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara otomatis menuntut perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tambakbaya, unsur penyelenggara Pemerintahan Desa hanya terdiri dari Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dibantu Perangkat Desa, tanpa posisi Badan Permusyawaratan Desa. Atas dasar itu, Pemerintah Desa Tambakbaya perlu meningkatkan kapasitas kemampuan Perangkat Desa¹, karena adaptasi atau penyesuaian dengan Undang-Undang yang baru tidak mudah serta kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) Perangkat Desa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Dalam bagian ketiga bab IX UU Desa mengenai Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, diamanatkan pengembangan sistem informasi desa (SID) demi membuka akses informasi dari dan hingga tingkat desa². UU Desa lebih lanjut mengatur bahwa SID akan dikelola oleh Pemerintah Desa, dan dapat diakses oleh masyarakat Desa beserta semua pemangku kepentingan. Sistem informasi desa ini merupakan sebuah sistem informasi yang menghubungkan antar fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh di lingkup desa. Pengertian secara undang-undang bahwa sistem informasi desa meliputi data desa, data pembangunan, data kawasan perdesaan yang terdiri dari software, hardware, jaringan dan

¹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

² Peraturan Pemerintah No 43 / 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa



sumberdaya manusia diartikan sebagai wujud dari perkembangan menuju *electronic government (E-government)*. Perkembangan peradaban era teknologi informasi memaksa penyelenggaraan tata pemerintahan desa untuk menggunakan sistem atau aplikasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi agar dapat mendukung tata pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan dukungan sistem informasi desa, pemerintah desa dapat mengelola basis data desa, menyebarluaskan informasi-informasi terkait pemerintahan desa, hingga pada tataran pengambilan keputusan oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan rujukan pada basis data yang lengkap dan akurat sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*).³

Desa Tambakbaya mulai melakukan penataan dalam pengelolaan tata pemerintah desanya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk beberapa program dan kegiatan pengelolaan potensi desa, hingga pada pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Sistem informasi desa yang dikembangkan merupakan hasil ide kreatif, inovatif dan pemikiran para actor/programmer lokal di desa yang merupakan potensi dalam implementasi sistem informasi desa ini. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi desa pada penelitian ini diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh desa untuk mendukung kegiatan pemerintah desa terkait pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan. Penelitian mengenai tata kelola pemerintah desa dengan memanfaatkan teknologi informasi ini sangat penting dilakukan atas dasar bahwa selama ini ada anggapan bahwa desa merupakan wilayah yang terpinggirkan dan tertinggal dalam pemanfaatan teknologi informasi.⁴

Desa Tambakbaya membuktikan bahwa anggapan tersebut tidak selamanya benar, dengan inisiatif dari desa untuk memanfaatkan teknologi informasi pemerintah Desa Tambakbaya sejak tahun 2013 dalam menunjang kegiatan pemerintahannya. Dalam penelitian ini untuk mengetahui tata kelola pemerintah berbasis e-government di Desa Tambakbaya dengan menggunakan konsep solusi dalam E-government menurut Backus (Palvia dan Sharma, 2007) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap informasi, tahap interaksi dan tahap transformasi. Tahap informasi ini pemanfaatan E-government dilakukan dengan menyediakan informasi dari pemerintah dalam hal ini adalah pemerintahan desa kepada masyarakat, swasta/bisnis, dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Kedua adalah tahap interaksi, yaitu tahap yang memungkinkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan berinteraksi langsung dengan pemerintah melalui saluran komunikasi yang tersedia. Ketiga adalah tahap transformasi yang memungkinkan semua layanan pemerintah melalui teknologi informasi yang terintegrasi dapat digunakan oleh masyarakat yang memiliki akun personal untuk dimanfaatkan dalam berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan/e-government di Desa Tambakbaya dilakukan secara bertahap, karena sebaik apapun perubahan akan menimbulkan berbagai reaksi mulai dari sekedar meragukan efektivitasnya sampai pada penolakan yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan pribadi tersembunyi (*vested interest*) yang bertentangan dengan tujuan perubahan tersebut. Menyadari dampak yang akan ditimbulkan dari perubahan tersebut, maka pada awal pemanfaatan e-government di

³ Purnomo, Joko, 2016, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest, Yogyakarta

⁴ A.W Wijaya, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Th 1979 (sebuah tinjauan), RajaGrafindo Persada, Jakarta



Desa Tambakbaya digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, promosi dunia usaha melalui situs web sebatas beritakegiatan atau media promosi mengenai hasil bumi, lokasi wisata, penyelenggaraan festival seni budaya, serta hasil kerajinan (UKM), dan sebagainya. Dari sisi informasi hal tersebut sudah cukup lengkap dan informatif, namun perlu dikembangkan fasilitas yang mendukung komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha.

Teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah Desa Tambakbaya pada awalnya hanya digunakan untuk mendukung kegiatan perangkat desa dalam kegiatan operasional sehari-hari, serta kegiatan promosi produk unggulan dan produk pariwisata. Tetapi belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam menjalankan programnya. Mengacu pada teori solusi konsep e-government dari Backus, pelaksanaan pelayanan publik di Desa Tambakbaya baru sampai pada tahap pertama dan kedua, tahap informasi dan tahap interaksi. Pada tahap informasi, pemerintah Desa Tambakbaya menyediakan website yang digunakan sebagai media promosi produk, promosi pariwisata, dan untuk kepentingan pemberitaan berbagai kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan, serta informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan. Sedangkan tahap interaksi baru sampai pada tataran masyarakat bisa memberikan feedback /timbal balik kepada pemerintah desa melalui e-mail ataupun media social milik pemerintah Desa Tambakbaya. Untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya administratif pemerintah Desa Tambakbaya belum bisa berinteraksi secara interaktif karena keterbatasan sumber daya manusia dan faktor pendukung lainnya terutama faktor kesiapan teknologi infomasi-nya. Sampai saat ini Pemerintah Desa Tambakbaya belum memiliki basis data kependu-

dukan yang terintegrasi dengan sistem informasi desa. Untuk itu, pemerintah desa butuh pengembangan aplikasi pengolahan basis data untuk mendukung sistem tata kelola sumber daya desa. Pemerintah desa juga belum memiliki sistem yang mendukung pengelolaan data di desa sehingga pelaporan disajikan banyak berdasarkan asumsi semata. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Tambakbaya bukan hanya dari keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan sistem informasi desa saja, tetapi juga kendala penerimaan dari masyarakat terhadap perubahan culture birokrasi. Biasanya birokrasi yang dilakukan bersifat tertutup, tetapi dengan menggunakan teknologi informasi maka transparansi atau keterbukaan informasi menjadi satu keharusan. Pemerintah Desa Tambakbaya pada awal penetapan sistem informasi desa adalah, dengan mengirim perangkat desa untuk mengikuti berbagai pelatihan pengelolaan sistem informasi yang diselenggarakan melalui program PNPM Mandiri pada tahun 2019. Dari hasil pelatihan sistem informasi desa ini membawa dampak pada perubahan prioritas pembangunan di Desa Tambakbaya, artinya pembangunan sumber daya manusia menjadi yang paling utama dibutuhkan saat itu dengan mengikut sertakan perangkat desa dan beberapa kader untuk mengikuti, pelatihan teknologi informasi. Pemerintah Desa Tambakbaya juga membuka peluang bagi, masyarakat desa atau komunitas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sistem informasi desa agar kemampuan literasi masyarakat meningkat sehingga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan. Selama 4 tahun perjalanan pemanfaatan teknologi informasi (*E-governance*) dalam pelayanan kepada masyarakat desa, pemerintah Desa Tambakbaya perlu meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam bidang teknologi informasi serta lebih intens lagi dalam menggandeng komunitas masyarakat yang melek teknologi informasi. Selain itu, peme-



rintah Desa Tambakbaya perlu menata ulang basis data agar dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Peran serta masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang ditunjang oleh teknologi informasi untuk lebih ditingkatkan lagi, hal ini perlu dukungan promosi dan penyebaran informasi dari pemerintah Desa kepada masyarakat sehingga daya literasi masyarakat semakin meningkat. Pemerintah Desa juga perlu membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun jaringan teknologi informasi sehingga tidak ada lagi wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet.

PENUTUP

Tuntutan perkembangan teknologi dan aturan perundang-undangan memaksa pelaksanaan Pemerintahan di Desa mengubah pelayanan dilakukan secara manual menjadi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi (sistem informasi desa).⁵ Selama ini pemerintah desa melakukan pelayanan publik secara manual dan belum memiliki sistem yang mendukung pengelolaan data sehingga waktu yang diperlukan pun menjadi lebih lama. Pemerintah Desa Tambakbaya telah meman-

faatkan teknologi informasi sejak belum berlakunya UU No. 6 tentang Desa atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, masih belum dilakukan secara informatif maupun interaktif melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui situs web. Walaupun demikian, pihak pemerintah desa menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang berupaya untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi/*E-governance* (penggunaan aplikasi) khususnya untuk pelayanan kepada publik atau masyarakat. Selama perjalanannya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi di Desa Tambakbaya baru sampai pada tahap informasi dan sebagian kecil tahap interaktif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan fasilitas teknologi informasi, masalah kapasitas sumber daya manusia baik dalam pemerintahan maupun masyarakat desa sebagai pengguna layanan masyarakat tersebut. Oleh karenanya interaksi dan sinergi yang efektif dan optimal sangat diperlukan, hal ini hanya dimungkinkan dengan diterapkannya *e-Governance* secara optimal. Sebagai konsep aplikatif, *egovernance* memang menawarkan alternative strategi mengubah pola kerja dan perilaku birokrasi.

DAFTAR PUSAKA

- A.W Wijaya, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Th 1979 (sebuah tinjauan), Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Purnomo, Joko, 2016, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest, Yogyakarta
- Saparin, Sumber, 1979, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintah No 43 / 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa

⁵ Saparin, Sumber, 1979, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta